

Intervensi Variabel Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Nurhidayati Islamiah^{1*}, Rahmatia², Hamid Paddu³, Muhammad Yusri Zamhuri⁴

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dosen Jurusan Manajemen, STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar

^{2,3,4} Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

*Email: nurhidayati_islamiah@yahoo.com

Received; 15-04, Revised; 15-06, Accepted; 28-06

Abstrak

Studi ini melihat adanya celah kritis dari beberapa penelitian terdahulu bahwa pengungkapan korelasi rasio pengangguran hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi saja. Sehingga novelty yang dikembangkan distudi ini adalah menambah variabel investasi dan variabel pengeluaran pemerintah (government expenditure) guna mengukur tingkat efektivitasnya untuk mengurangi rasio pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Metode analisis regresi yang digunakan adalah linear dalam wujud Structural Equation Modelling (SEM) untuk mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pada demonstrasi structural equation modeling dilakukan dengan tiga tahapan yaitu uji model fit untuk menganalisis kelayakan model dengan menilai value TLI, CFI, AGFI dan RMSEA, kemudian pengujian secara langsung (direct effect) dengan nilai standardized dan pengujian secara tidak langsung (indirect effect). Adapun variabel yang didemonstrasikan adalah investasi (INV), Pengeluaran Pemerintah (PP), Tingkat Pengangguran (P), Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Ketimpangan Pendapatan (K). Demonstrasi hubungan antar variabel dibagi dalam 2 (dua) sub kategori yakni Indonesia bagian timur (T) dan Indonesia bagian barat (B). Pada studi ini data yang digunakan adalah data sekunder sehingga beberapa tahapan pengujian diabaikan seperti pengujian validitas, reliabilitas dan pengujian outlier serta uji normalitas. Oleh sebabnya dengan ditiadaknya tahapan pengujian tersebut maka pengujian data langsung kepada tahap model fit. Adapun data pengukuran (menggunakan metode LN). Studi ini terdiri dari delapan hipotesis pengujian secara langsung dan empat pengujian dengan model mediasi. Hasil studi menyatakan bahwa, investasi berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tapi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran berpengaruh negative signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Serta pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dilain sisi pada demonstrasi pengujian secara tidak langsung seluruh variasi hubungan menyatakan pengaruh yang positif dan signifikan.

Keywords: Investasi Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, dimana prestasinya menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam hal penurunan tingkat kemiskinan sejak tahun 1999 (Yenny Tjoe, 2018). Indonesia juga merupakan negara dengan populasi keempat terbesar dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (Putra, Said, dan Hasan, 2017). Akan

tetapi persoalan penurunan tingkat kemiskinan, belum dibarengi dengan penurunan rasio ketimpangan pendapatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pendapatan di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh penduduk terkaya dengan presentase 20% daripada masyarakat lainnya (www.worldbank.org, 2015) bahkan ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan miskin di Indonesia masih tergolong tinggi. Ketimpangan tercermin dari akumulasi kekayaan yang hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat. Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat tertinggi dengan presentase sebesar 49,3% dari Sembilan negara (Rusia, Thailand, India, Brazil, Tiongkok, Amerika Serikat, Afrika selatan dan Meksiko), 49,3% menunjukkan bahwa kekayaan nasional dimiliki oleh 1% warga negara kaya saja. Kendatipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki urutan ketiga tercepat diantara negara G-20 lainnya, pernyataan ini sesuai dengan penjelasan angka statistik tahun 2000 – 2017 menunjukkan angka PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia per kapita meningkat 4% setiap tahun setelah China dan India (Yenny Tjoe, 2018). Gini Indeks ratio negara Indonesia juga meningkat dari 30 pada era tahun 90-an menjadi 39 di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat tidak sejalan dengan pemerataan pendapatan sehingga memicu ketimpangan antar penduduk. Ketimpangan pendapatan yang bergerak lambat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipicu oleh beberapa aspek yang fundamental yakni kualifikasi pendidikan serta permintaan pasar terhadap tenaga kerja profesional (labor market and skill labor) dan berketerampilan yang juga ikut meningkat (www.worldbank.org, 2015). Sejalan dengan hasil kajian empiris mengenai keterkaitan antara tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan seperti yang dikemukakan oleh (Gächter et al., 2017; Shao et al., 2016) yang menyatakan bahwa korelasi kuat dapat terjadi apabila tingkat pengangguran dapat ditekan akan menyebabkan ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan. Akan tetapi terdapat hasil penelitian yang kontras menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara ketimpangan pendapatan yang dimotori oleh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran (Sadiku, Ibraimi, dan Sadiku, 2015; Ghoshray, Ordóñez, dan Sala, 2016)

Oleh karena itu dalam APBN Indonesia di tahun 2018, pemerintah Indonesia menganggarkan pendanaan sebesar 347,4 rupiah Triliun untuk memenuhi sektor pelayanan umum, sebanyak 157.6 Triliun rupiah untuk sector perlindungan sosial dan 143.1 triliun rupiah untuk sektor pendidikan (www.kemenkeu.go.id, 2018). Upaya tersebut untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi. Ketimpangan pendapatan dapat berakibat pada aspek dasar pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia seperti makanan, kesehatan dan pendidikan (Ram, 1982; Ram, 1992; Di Domenico & Fournier, 2014) sehingga ikut berdampak signifikan pada proses percepatan pembangunan manusia (IPM). Dalam teori ekonomi makro, pembangunan manusia (IPM) tergantung pada dua aspek utama yakni, pertumbuhan ekonomi dan menurunnya ketimpangan antar penduduk (Sargent, 2009; Davidson, 2011). Peningkatan Indeks Pembangunan manusia yang sistematis diperlukan upaya pemerintah dari segi peningkatan pada sektor pendidikan yang merata, sebab ketimpangan pendapatan disebabkan salah satunya oleh tingginya angka pengangguran. Salah satu penelitian menemukan fakta bahwa investasi pembangunan manusia salah satunya dimulai dari peningkatan pendidikan yang lebih baik sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sehingga keterkaitan antara investasi dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) melalui sektor pendidikan berdampak langsung ketimpangan pendapatan bagi angkatan kerja produktif (Lavrinovicha dan Teivans, 2015; www.bbc.com, 2014). Di tahun 2016, hasil penelitian dari (lavrinovicha, et.,al, 2016; Kim dan Shao et.,al, 2016; Kudasheva, Kunitsa, dan Mukhamediyev, 2015) menyatakan bahwa ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan bersumber dari tidak meratanya akses pendidikan. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang berefek langsung pada tingginya angka pengangguran juga akan berdampak pada ketimpangan kesehatan dan kesejahteraan sosial (Kim, 2016; Shao et al., 2016). Sehingga harapan yang ingin dicapai adalah pemerataan dari segala aspek untuk mencegah terjadinya ketimpangan ditengah masyarakat (Gächter et al., 2017).

Paparan teoritis dan pengungkapan fenomena factual mengenai keterkaitan investasi, pengeluaran pemerintah (Government expenditure) dalam kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Melahirkan gagasan pokok terkait beragamnya kesesuaian dan ketidaksesuaian antara teori, fakta dan hasil pengujian empiris guna menjembatani hasil penelitian sebelumnya dan penelitian kami hari ini. Hasil penelitian dari (Adriana, 2014; Roşoiu, 2015; Sadiku et al., 2015) yang dilakukan di Negara Macedonia menyimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antara pertumbuhan

ekonomi dan rasio pengangguran. Penelitian lainnya yang dinilai memiliki keterbatasan dalam pengungkapan dan pengujian variabel dalam mengukur tingkat pengangguran juga ditunjukkan dari hasil penelitian (Ghoshray et al., 2016; Khodeir, 2016; Strat et al., 2015) dimana keduanya menyatakan bahwa investasi asing tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu studi peneliti melihat adanya celah kritis dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan bahwa pengungkapan korelasi rasio pengangguran hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi saja. Sehingga novelty yang dikembangkan distudi ini adalah menambah variabel investasi dan variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) guna mengukur tingkat efektivitasnya untuk mengurangi rasio pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Hidayat, 2014). Menurut Kuncoro (2006) ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2004). Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Hidayat, 2014). Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umunya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negaranegara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik. Kebenaran hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section.

Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya. Kuznets, (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet "U-Terbalik", karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu kemudian mengalami penurunan. Kuznet menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern. Williamson menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara. Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh (Myrdal dan Sitohang, 1957). Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk

menjelaskannya menggunakan spread effect dan backwash effect sebagai pengaruh penjaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect (dampak sebar) diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (favourable effect), mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Backwash effect (dampak balik) diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian (infavourable effect), mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti dan mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Menurut Myrdal dan Sitohang, (1957), terjadinya ketimpangan regional karena besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal akan meningkatkan ketimpangan regional, peningkatan permintaan ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.

2.2. Investasi pemerintah

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut (Sukirno, 2004) adalah merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah, Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Investasi dalam ekonomi makro, juga dapat dibedakan atas investasi otonom (otonomous investment) dan investasi terpengaruh (induced investment). Investasi otonom adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jenis investasi ini umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan investasi yang terpengaruh adalah investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa.

2.3. Pengangguran

Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka. Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur diatas 15 tahun keatas. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari

tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari Tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada atau dengan kata lain tingkat pengangguran terbuka adalah Persentase penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.

2.4. Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut: Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari - hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir Pengeluaran pembangunan dimana merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Pemerintah memiliki 4 peran yaitu: Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi, Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil - hasil ekonomi secara adil dan wajar, Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium, dan Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

III. Design Penelitian dan Metodologi

3.1. Data

Penelitian ini dirancang mengembangkan sebuah model penelitian empiris melalui hubungan langsung maupun tidak langsung masing-masing variabel seperti investasi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan variabel ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pendekatan penelitian yakni kuantitatif. Sampel penelitian menggunakan data makroekonomi tahun 2003-2018. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data makroekonomi pemerintah Indonesia tahun 2003 – 2018 yang meliputi data tingkat perkembangan investasi pemerintah, data tingkat pengeluaran pemerintah, tingkat pertumbuhan ekonomi data tingkat pengangguran dan data tentang rasio ketimpangan pendapatan di wilayah Indonesia bagian barat periode 2003 – 2018.

3.2. Pengukuran

Untuk menjawab rumusan masalah maka dilakukan pengujian analisis regresi linear dalam wujud Structural Equation Modelling (SEM) untuk mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pada demonstrasi structural equation modeling dilakukan dengan tiga tahapan yaitu uji model fit untuk menganalisis kelayakan model dengan menilai value TLI, CFI, AGFI dan RMSEA, kemudian pengujian secara langsung (direct effect) dengan nilai standardized dan pengujian secara tidak langsung (indirect effect). Adapun variabel yang didemonstrasikan adalah investasi (INV), Pengeluaran Pemerintah (PP), Tingkat Pengangguran (P), Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Ketimpangan Pendapatan (K). Demonstrasi hubungan antar variabel dibagi dalam 2 (dua) sub kategori yakni Indonesia bagian timur (T) dan Indonesia bagian barat (B). Pada studi ini data yang digunakan adalah data sekunder sehingga beberapa tahapan pengujian diabaikan seperti pengujian validitas, reliabilitas dan pengujian outlier serta uji normalitas. Oleh sebabnya dengan ditiadaknya tahapan pengujian tersebut maka pengujian data langsung kepada tahap model fit. Adapun data pengukuran (menggunakan metode LN) pada studi ini adalah disajikan seperti pada table 1.

Tabel 1. Data Makro 2003 - 2018

Investasi Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah	Tingkat Pengangguran	Ketimpangan Pendapatan
6,54	1,62	29,8	2,2	-1,05
6,6	1,46	29,52	2,22	-1,14
7,48	1,5	29,73	2,31	-1,08
7,22	1,67	29,77	2,29	-1,11
7,61	1,7	29,4	2,17	-1,14
7,16	1,67	29,52	2,05	-1,08
7,65	1,43	29,73	2,02	-0,99
7,8	1,77	29,77	1,92	-1,02
8,14	1,84	29,78	1,88	-0,99
8,33	1,82	29,8	1,7	-0,97
8,56	1,75	29,8	1,69	-0,99
8,9	1,66	29,81	1,65	-0,99
9,02	1,55	29,82	1,74	-1,02
9,23	1,61	29,82	1,66	-1,02
8,72	1,61	29,82	1,61	-1,05
9,56	1,65	29,82	1,57	-1,05

IV. Hasil Penelitian & Pembahasan

4.1. Pengujian Kualitas Data

Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya telah dilakukan pada waktu model diestimasi oleh AMOS. Model fit dengan kriteria model fit seperti GFI (Goodness of fit index), adjusted GFI (AGFI), Tucker Lewis Index (TLI), CFI (Comparative of fit index), dan RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) baik untuk model individual maupun model lengkap. Adapun kriteria pengukuran model disajikan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Model Fit

Goodness of fit index	Cut-off Value	Hasil Model*	Keterangan
Chi_square	Diharapkan kecil	1.455	Baik
Probability	≥ 0,05	0.228	Baik
CMIN/DF	≤ 2,00	1.455	Baik
RMSEA	≤ 0,08	0.174	Marginal
GFI	≥ 0,90	0.964	Baik
AGFI	≥ 0,90	0.465	Marginal

TLI	≥ 0,94	0.887	Marginal
CFI	≥ 0,94	0.989	Baik
Df		1.455	

Berdasarkan hasil pengujian kualitas data untuk Indonesia bagian barat seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 didapatkan bahwa nilai chi-square sebesar 1.455, nilai probability sebesar $0.228 > 0.05$ yang berarti nilai probabilitasnya adalah baik, CMIN/DF sebesar $1.455 < 2.0$ yang berarti nilai CMIN adalah baik, nilai RSMEA yang masuk dalam kategori marginal yakni sebesar $0.174 < 0.08$, nilai GFI masuk dalam kategori baik yakni sebesar $0.964 > 0.90$, nilai AGFI sebesar $0.465 < 0.90$ yang masuk dalam kategori marginal, nilai TLI sebesar $0.887 < 0.90$ masuk dalam kategori marginal dan nilai CFI masuk dalam kategori baik. Disimpulkan dari tabel 3 sebagian besar asumsi kelayakan data telah terpenuhi.

4.2. Estimasi Regression Weights Indonesia Bagian Barat

Uji statistik hasil pengolahan dengan SEM dilakukan dengan melihat tingkat signifikan hubungan antar variabel yang ditampilkan melalui critical ratio (c.r) dan nilai significance probability masing-masing hubungan antar variabel. Berikut ini adalah output tabel pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan alat uji AMOS dalam bentuk output Regression Weights seperti pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Estimasi Regression Weights Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan

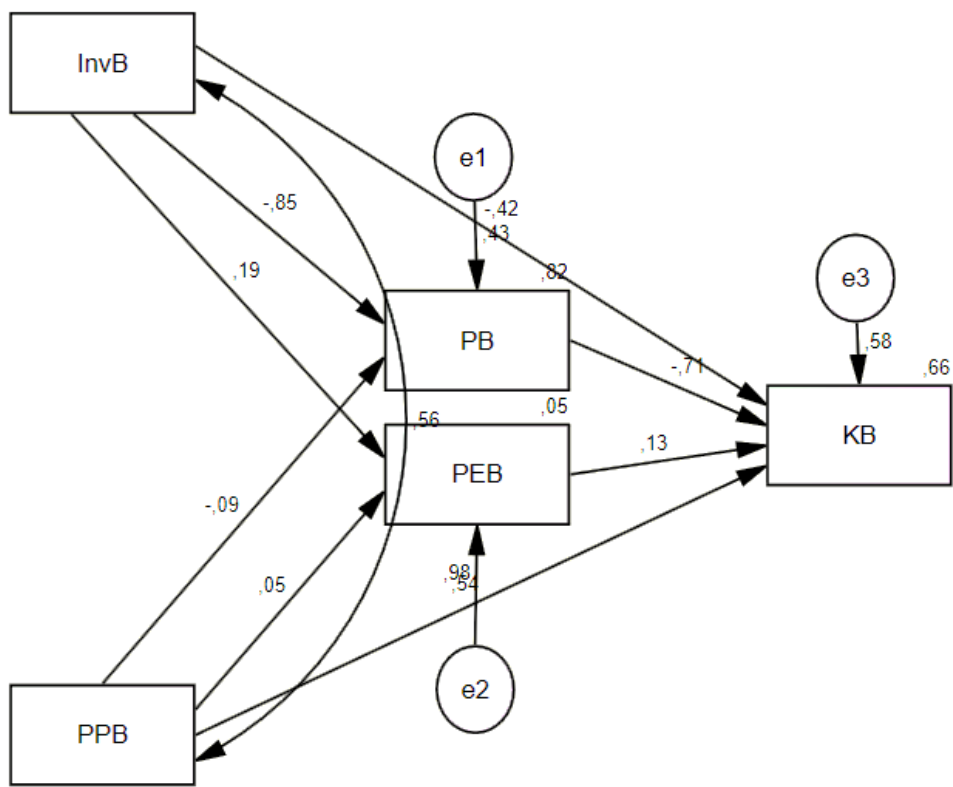
Dependent		Independent	Estimate	S.E.	C.R.	P	Keterangan
PEB	<---	PPB	,042	,277	,153	,879	Tidak Signifikan
PB	<---	InvB	-,243	,038	-6,432	***	Negatif Signifikan
PB	<---	e1	,077	,014	5,477	***	Positif Signifikan
PEB	<---	e2	,080	,015	5,477	***	Positif Signifikan
PB	<---	PPB	-,187	,266	-,702	,483	Tidak Signifikan
PEB	<---	InvB	,025	,039	,635	,526	Tidak Signifikan
KB	<---	InvB	-,024	,020	-1,194	,232	Tidak Signifikan
KB	<---	PPB	,221	,075	2,930	,003	Positif Signifikan
KB	<---	PB	-,145	,072	-2,020	,043	Negatif Signifikan
KB	<---	PEB	,058	,069	,835	,404	Tidak Signifikan
KB	<---	e3	,021	,004	5,477	***	Positif Signifikan
Square Multiple Regression							
							Estimate
Tingkat Pengangguran							0.819
Pertumbuhan Ekonomi							0.049
Ketimpangan Pendapatan							0.664

Hasil yang dilustrasikan pada Tabel 3 yang menjelaskan tentang hubungan antara variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah bervariasi. Misalnya Pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat ditemukan hasil yang tidak signifikan (C.R = 0.153, sig. Level = 0.879 > 0.05). Pengaruh variabel investasi Indonesia bagian barat terhadap tingkat pengangguran Indonesia bagian barat berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya investasi memerlukan variabel intervensi terhadap tingkat pengangguran agar memperoleh pengaruh yang signifikan. Adapun nilai value pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran adalah CR = -6.432 dan sig. Level = < 0.01. Pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan yakni CR = -0.702 dan nilai sig. Level = 0.483 > 0.05. Hasil ini yang tidak signifikan ini juga ditunjukkan pada pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Di lain sisi, pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan memperoleh nilai yang positif dan signifikan CR = 2.930 sig. Level = 0.003 < 0.05. Hasil yang berbanding terbalik justru ditunjukkan pada demonstrasi variabel tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan yang memperoleh nilai yang negatif signifikan yakni CR = -2.020 dan sig level 0.043 < 0.05. Kemudian nilai R-Square variabel dependen yakni Tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian

barat atas variabel independent yakni investasi dan pengeluaran pemerintah menunjukkan nilai R-Square yakni tingkat pengangguran = 0.819 atau 81.9% yang berarti investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki keterkaitan terhadap tingkat pengangguran sebesar 81.9%. Selanjutnya, hubungan antara investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang sangat lemah yakni sebesar 0.049 atau 0.49%. Serta hubungan antara investasi, pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat sebesar 0.664% atau 66.4%.

4.3. Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Secara Langsung dan Tidak Langsung Variabel Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Pada section ini dijelaskan tentang hasil koefisien variable yang menggambarkan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total antara variable investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia bagian barat. Hubungan antar variable yang dijelaskan dalam bentuk structural equation modelling (SEM) juga Nampak pada gambar 1.



Gambar 1. Structural Equation Model Variabel Investasi (INV), Pengeluaran Pemerintah (PP), Tingkat Pengangguran (P), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Ketimpangan Pendapatan (K)

Tabel 4. Estimasi Koefisien Variabel dan Arah Pengaruh Antar Variabel

No	Arah Pengaruh Antar Variabel / Hipotesis Penelitian	Angka Koefisien Estimasi Untuk Pengaruh Variabel		
		Langsung	Tidak Langsung	Keterangan
Hipotesis 1				
1.1	Investasi (INVB) → Tingkat Pengangguran (PB)	-6,432		Negatif Signifikan
1.2	Investasi (INVB) → pertumbuhan ekonomi (PEB)	0,635		Tidak Signifikan
1.3	Investasi (INVB) → ketimpangan pendapatan (KB)	-1,194		Tidak Signifikan

No	Arah Pengaruh Antar Variabel / Hipotesis Penelitian	Angka Koefisien Estimasi Untuk Pengaruh Variabel		
		Langsung	Tidak Langsung	Keterangan
1.4	Pengeluaran Pemerintah (PPB) → Tingkat Pengangguran (PB)	-0,702		Tidak Signifikan
1.5	Pengeluaran Pemerintah (PPB) → Pertumbuhan Ekonomi (PEB)	0,153		Tidak Signifikan
1.6	Pengeluaran Pemerintah (PPB) → Ketimpangan Pendapatan (KB)	2,930		Positif Signifikan
1.7	Tingkat Pengangguran (PB) → Ketimpangan Pendapatan (KB)	-2,020		Negatif Signifikan
1.8	Pertumbuhan Ekonomi (PEB) → → Ketimpangan Pendapatan (KB)	0,835		Tidak Signifikan
Hipotesis 2				
2.1	Investasi (INVB) → Tingkat Pengangguran (PB) → Ketimpangan Pendapatan (KB)		0.037	Signifikan
2.2	Investasi (INVB) → Pertumbuhan Ekonomi (PEB) → Ketimpangan Pendapatan (KB)		< 0.01	Signifikan
2.3	Pengeluaran Pemerintah (PPB) → Tingkat Pengangguran (PB) → ketimpangan pendapatan (PEB)		0.030	Signifikan
2.4	Pengeluaran Pemerintah (PPB) → Pertumbuhan Ekonomi (PEB) → ketimpangan pendapatan (PEB)		< 0.01	Signifikan

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Analisis komparasi bertujuan untuk melihat perbedaan rata-rata variabel terikat antara dua kelompok atau lebih. Syarat-syarat uji komparasi (dalam statistik inferens) yaitu datanya berdistribusi normal dan variansnya homogen. Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan structural equation model seperti yang ditunjukkan pada table 4. Hasil pengujian hipotesis kemudian dapat diuraikan. Adapun hasil interpretasi hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1.1. Pengaruh Langsung Investasi terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable investasi terhadap tingkat pengangguran pada Indonesia bagian barat berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien nilai CR = -6.432 dengan tingkat signifikansi < 0.01. Artinya secara rasional bahwa investasi tidak secara otomatis berpengaruh terhadap tingkat pengangguran kecuali investasi diintervensi atau dimediasi oleh variabel lain. Hubungan pada hipotesis ini menggambarkan bahwa dalam keadaan konstan investasi pemerintah berhasil menurunkan angka tingkat pengangguran sebesar 6.4%. Hasil studi ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

1.2. Pengaruh Langsung Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Indonesia bagian barat menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada investasi hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Indonesia bagian barat sebesar 0.635 atau 6.3%. Hasil hipotesis ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi.

1.3. Pengaruh Langsung Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable investasi terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya besar kecilnya

kenaikan satu satuan pada investasi hanya berkontribusi kecil terhadap upaya menurunkan ketimpangan pendapatan. Hasil hipotesis ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara investasi dan ketimpangan pendapatan.

1.4. *Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran pada Indonesia bagian barat menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada pengeluaran pemerintah hanya berkontribusi kecil atau dapat dicitakan kontribusinya tidak signifikan terhadap upaya untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil hipotesis ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran.

1.5. *Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Indonesia bagian barat menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada pengeluaran pemerintah kontribusinya sangat signifikan terhadap upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil hipotesis ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

1.6. *Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada pengeluaran pemerintah tetap berkontribusi terhadap upaya untuk mengurangi potensi ketimpangan pendapatan secara langsung. Hasil hipotesis ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

1.7. *Pengaruh Langsung Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan akan tetapi negatif. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada tingkat pengangguran berkontribusi secara tidak langsung terhadap potensi ketimpangan pendapatan. Hasil hipotesis ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

1.8. *Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan variable tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi secara langsung terhadap potensi ketimpangan pendapatan. Hasil hipotesis ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

2.1. *Pengaruh Tidak Langsung Antara Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan jika diintervensi oleh tingkat pengangguran.*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan tidak langsung variable investasi terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat jika diintervensi oleh tingkat pengangguran menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada investasi secara tidak langsung berpengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil hipotesis ini menguatkan hasil demonstrasi hubungan variable

secara langsung antara investasi, tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan yang sama-sama bernilai signifikan. Hasil hipotesis ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara investasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia bagian barat jika dimediasi oleh variable tingkat pengangguran.

2.2. *Pengaruh Tidak Langsung Antara Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan jika diintervensi oleh pertumbuhan ekonomi.*

Hasil yang ditunjukkan pada table 5 yang menjelaskan tentang hubungan tidak langsung variable investasi terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat jika diintervensi oleh pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada investasi secara tidak langsung berpengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan jika investasi memicu pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Hasil hipotesis ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara investasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia bagian barat jika dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

2.3. *Pengaruh Tidak Langsung Antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan jika diintervensi oleh Tingkat Pengangguran.*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan tidak langsung variable pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat jika diintervensi oleh tingkat pengangguran menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan jika pengeluaran pemerintah memicu turunnya tingkat perekonomian terlebih dahulu akan tetapi pada hasil pengujian secara langsung menyatakan hasil yang kontradiktif yakni tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran. Namun hasil hipotesis ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pendapatan di Indonesia bagian barat jika dimediasi oleh tingkat pengangguran.

2.4. *Pengaruh Tidak Langsung Antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Bagian Barat jika diintervensi oleh Pertumbuhan Ekonomi.*

Hasil yang ditunjukkan pada table 4 yang menjelaskan tentang hubungan tidak langsung variable pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan pada Indonesia bagian barat jika diintervensi oleh pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya besar kecilnya kenaikan satu satuan pada pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan jika investasi memicu turunnya tingkat perekonomian terlebih dahulu akan tetapi pada hasil pengujian secara langsung menyatakan hasil yang kontradiktif yakni tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran. Namun hasil hipotesis ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pendapatan di Indonesia bagian barat jika dimediasi oleh tingkat pengangguran.

4.5. **Pembahasan**

Pada demonstrasi yang menggambarkan hubungan antara investasi dan pengangguran menjelaskan bahwa efek yang ditimbulkan antara investasi terhadap besarnya tingkat pengangguran baik di wilayah Indonesia bagian barat dan timur pada studi ini adalah sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya investasi pemerintah berupa investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal luar negeri (PMLN). Terbukti memberikan efek secara tidak langsung untuk menekan rasio tingkat pengangguran; sehingga dalam beberapa studi terdahulu hasil yang kami temukan memberikan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang sebagian besar menyatakan bahwa secara langsung investasi pemerintah yang meningkat tentu saja secara konstan ikut mengurangi tingginya angka pengangguran. Investasi pemerintah dapat berarti pembentukan modal dimana investasi salah

satunya merupakan jalan keluar utama dari masalah setiap negara dan merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Investasi pemerintah melalui PMDN dan PMLN dapat menjadi persyaratan umum untuk pembangunan ekonomi suatu negara yang bersifat akumulasi terhadap modal. Investasi dan keterkaitannya terhadap pengurangan tingkat pengangguran dapat diekstraksi melalui alokasi peralatan fisik dan sumber daya manusia; serta penyiapan teknologi.

Melalui investasi pemerintah, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi potensi pengangguran, dan sebagai upaya ekspansi dalam hal kegiatan perekonomian. Investasi pemerintah merupakan salah satu alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan stimulus membuka lapangan kerja untuk mencapai keunggulan perekonomian. Secara aggregate, investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran maka akan berpotensi pajak yang lebih besar kepada pemerintah yang berasal dari masyarakat. Saat penyerapan tenaga kerja berlangsung secara pesat maka secara otomatis hasil kegiatan perekonomian secara mikro akan menghasilkan pajak yang besar, sehingga target pertumbuhan ekonomi negara bisa tercapai. Pemerintah kemudian dapat membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi dari Trejo García et al., (2017) yang berjudul *Analysis of the hysteresis of unemployment in Mexico in the face of macroeconomic shocks*, menyatakan bahwa Monetary level berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan pasar tenaga kerja. Disamping itu Investasi juga memberikan arti penting terhadap peluang untuk menciptakan Ketersediaan pasar tenaga kerja. Kemudian Diperjelas didalam studi dari (Guerrazzi, 2015; Qiong dan Junhua, 2015; Omri dan kahouli, 2014; Sadikova et al., 2017) yang menyatakan bahwa biaya investasi akan berpengaruh terhadap produktivitas. Efek domino yang diciptakan dari meningkatnya produktivitas ialah berbanding lurus terhadap penurunan tingkat pengangguran (Elshamy, 2013). Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 5 pada lampiran ini yang menyatakan bahwa Ketika investasi mengalami kenaikan maka secara aggregate turut menurunkan angka pengangguran.

Pada hasil pengujian juga diperoleh nilai tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan; Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan penambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat maka secara otomatis masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhannya. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai senjata ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk menghapuskan kemiskinan. Sehingga, tolok ukur laju pertumbuhan ekonomi dapat menjadi jargon ekonomi yang begitu populer untuk dicapai. Kesuksesan pembangunan salah satunya juga diukur dengan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hasil analisis pada studi ini menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi bersifat positif / langsung terhadap penurunan rasio ketimpangan pendapatan hanya secara parsial yakni di wilayah timur Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi comparasi oleh Han et al., (2015) yang menyatakan bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi pada objek suatu wilayah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga akan memicu income yang merata sehingga menjamin penurunan ketimpangan pendapatan (Saari, Dietzenbacher, dan Los, 2015). Dapat dilihat pada gambar 6, yang menjelaskan tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dimana diilustrasikan bahwa Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan atau penurunan maka akan memicu rasio ketimpangan pendapatan.

Investasi pemerintah merupakan akses dalam mengangkat perekonomian suatu negara. Bahkan begitu populernya, investasi diupayakan merujuk pada system industrialisasi yang mengedepankan teknologi, menjadikannya semacam "ideologi dan alat" pembangunan ekonomi yang dipercaya kemanjurannya untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Investasi adalah salah satu indikator untuk menentukan apakah pembangunan ekonomi nasional mengalami peningkatan atau tidak, sehingga dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk Indonesia untuk dapat membantu para investor maupun calon investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya. Oleh sebab itu peningkatan investasi juga diyakini dapat memberikan andil yang besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, investasi juga memiliki peran sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau

Gross Domestic Product (GDP) sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi. Investasi baik yang bersifat dalam negeri maupun luar negeri akan saling terkait terhadap PDB maupun pendapatan nasional, apabila investasi mengalami kenaikan, maka PDB pun akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi yang paling penting dalam struktur investasi pemerintah adalah realisasi dari investasi itu sendiri. Realisasi investasi pemerintah Indonesia sendiri mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Akan tetapi tren investasi pemerintah untuk wilayah Indonesia bagian timur cenderung mengalami volality yang signifikan kendatipun mengalami peningkatan dari tahun ketahun daripada tingkat investasi pemerintah Indonesia untuk wilayah Barat. Realisasi investasi pemerintah dominasi kontribusi terbesar adalah disektor transportasi, Gudang dan telekomunikasi dan Pulau Jawa (Indonesia barat) merupakan lokasi investasi yang paling dominan. Sehingga secara kumulatif sepanjang periode kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 611,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp 301,7 triliun dan PMDN sebesar Rp 309,9 triliun. Sebagai hasil daripada realisasi investasi pemerintah tersebut maka terjadi penyerapan sekitar 861.581 orang tenaga kerja Indonesia. Dampak daripada realisasi investasi pemerintah sendiri mencakup dua aspek sumber penting yakni Investasi dalam negeri dan luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia juga mendapat tren yang positif yang memberikan ilustrasi bahwa jika investasi mengalami kenaikan maka tingkat pengangguran secara aggregate mengalami penurunan. Hasil penelitian ini membenarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Trejo García et al., (2017) yang menyatakan bahwa investasi pemerintah memberikan arti penting terhadap peluang untuk menciptakan Ketersediaan pasar tenaga kerja. Afidchao et al., (2014) pada studinya menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada investasi di sektor pariwisata dan investasi asing langsung (Szkorupová, 2014) dan (Mihaiu dan Opreana, 2013). Studi yang dilakukan oleh (Kudasheva et al., 2015) dan (Halvarsson et al.,2018) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap berkurangnya potensi ketimpangan pendapatan. Investasi pemerintah dapat terwujud melalui Melalui regulasi pemerintah yang pro terhadap produksi. Secara definisi, Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada gambar 9 seperti yang dijelaskan pada lampiran, juga mencerminkan tentang perbandingan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran di Indonesia secara keseluruhan. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, nilai pendapatan masyarakatpun ikut menurun, artinya jika pendapatan menurut maka daya beli masyarakat juga mulai menurun. Hal ini menjadi masalah terlambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia, Tingginya tingkat pengangguran juga berdampak pada persoalan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun secara nasional. Gambar 33 memberikan ilustrasi mengenai perbedaan tingkat pengangguran antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Beragam asumsi yakni perbedaan tingkat pengangguran di kedua wilayah dapat ditenggarai oleh potensi lapangan pekerjaan yang terbuka dan tidak seimbang oleh para pencari kerja serta perbedaan potensi angka kelahiran yang memicu potensi naik atau turunnya angka pengangguran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Hal tersebut diasumsikan oleh berbagai factor diantaranya adalah salah satunya perbedaan tingkat jumlah penduduk, perbedaan tingkat produktivitas dan juga perbedaan sector-sektor produksi. Pertumbuhan ekonomi secara definisi berarti peningkatan dalam kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB). Interpretasi tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Dimana Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Pemicu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang dapat mendukung pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur mengisyaratkan adanya perbedaan perlakuan salah satunya berasal dari investasi pemerintah, tingkat pengangguran, serta aspek-aspek produksi yang bersifat multisectoral di Indonesia.

Seluruh hasil pengujian secara langsung baik pada wilayah Indonesia bagian barat dan timur yakni hubungan antara variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah berpengaruh tidak signifikan. Akan tetapi hasil yang kontradiktif ditemukan pada hubungan secara intervening yang melibatkan variasi hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan yang di jembatan oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran; baik di wilayah barat dan timur Indonesia, tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Artinya, pengeluaran pemerintah tidak mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak merefleksikan adanya peran terhadap ketimpangan pendapatan. Ketimpangan (*kesenjangan*) ekonomi secara harfiah berarti keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat baik segi pendapatan, dan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketimpangan ekonomi terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan/wilayah tertentu. Oleh sebab itu, Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pengeluaran pemerintah termasuk didalamnya adalah belanja rutin dan belanja untuk kebutuhan peningkatan pelayanan social dimasyarakat memegang peranan penting sebagai bentuk pembangunan berskala regional. Dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Adanya perbedaan besaran tingkat pengeluaran pemerintah juga turut dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya perbedaan kondisi daerah serta implikasi dari tujuan corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah. Tujuan daripada pengeluaran pemerintah salah satunya adalah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan seluruhnya masyarakat Indonesia; pembangunan daerah perlu dipacu secara bertahap. Oleh sebab itu, Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional haruslah dilakukan kordinasi yang baik antara keduanya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di daerah lain. Sebelum suatu daerah menyusun berbagai langkah-langkah dalam pembangunan daerahnya dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyek-proyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun. Hasil penelitian ini

sejalan dengan study yang dilakukan oleh Bouwmeester dan Scholtens, (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang bertumbuh juga berdampak pada pengurangan pengangguran. Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Mihaiu dan Opreana, 2013). Begitu juga pengeluaran pada level mikro dan R&D (Candemir & Zalluhoglu, 2011). Disisi lain, studi Comparasi juga menyatakan bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi pada objek suatu wilayah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Han et al., 2015). Hasil analisa secara langsung pada wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran begitu juga dengan hubungan yang menjelaskan tentang besaran tingkat pengeluaran pemerintah juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Disisi lain, tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika tingkat pengangguran mengalami kenaikan di Indonesia wilayah barat maka akan memicu pula kenaikan rasio ketimpangan pendapatannya secara tidak langsung. Begitupula sebaliknya, jika rasio tingkat pengangguran mengalami penurunan, maka juga berdampak secara langsung dalam upaya menurunkan rasio ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan yang ditunjukkan pada hasil analisis di wilayah timur Indonesia, dimana seluruh pengujian yang menghubungkan antara pengaruh pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan adalah bernilai negative signifikan. Artinya, pada wilayah timur Indonesia, factor pengeluaran pemerintah tidak secara langsung memberikan dampak terhadap upaya menurunkan tingkat pengangguran dan juga menurunkan rasio ketimpangan pendapatan.

V. Simpulan Dan Saran

Studi ini memberikan pemahaman mendalam terutama bagi para pembelajar dibidang Ilmu Ekonomi dan studi pembangunan yang secara teoritis memberikan fakta bahwa hubungan antara investasi pemerintah, pengeluaran pemerintah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran serta rasio ketimpangan pendapatan. Dari segi implikasi secara managerial, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi dalam memaksimalkan potensi investasi pemerintah serta realisasi investasi tersebut yang diperuntukkan untuk pertimbangan mencapai pertumbuhan ekonomi, menurunkan rasio pengangguran serta capaian akhir yakni berkurangnya rasio ketimpangan pendapatan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh yakni dengan pengembangan potensi sector investasi, pengembangan infrastruktur dan pelayanan, penguatan sumberdaya manusia, serta penguatan regulasi dan kelembagaan antar sektor. Orientasi kebijakan investasi baik yang bersifat dalam maupun luar negeri dan pengeluaran pemerintah harus lebih diarahkan ke sektor-sektor yang menjadi potensi regional dan nasional. Untuk lebih meningkatkan daya saing ekonomi yang berguna untuk mengurangi tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan di Indonesia, perlu adanya pembenahan di berbagai bidang seperti infrastruktur, peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengoptimalan sumberdaya alam yang dimanfaatkan sebagai modal dalam pengembangan investasi dan ekonomi yang lebih kompetitif. Realisasi investasi pemerintah, dan juga pengeluaran pemerintah untuk mengurangi dampak tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan telah terealisasi dengan baik, kendatipun perlu tetap mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan kembali. Sehingga perhatian pada aspek-aspek sectoral ekonomi penting untuk mendapat perhatian dan pengoptimalan bukan hanya secara teknis dan administrasi tapi juga fungsi pengawasan dan regulasi.

Daftar Pustaka

- Adriana, D. (2014). Revisiting the Relationship between Unemployment Rates and Shadow Economy. A Toda-Yamamoto Approach for the Case of Romania. *Procedia Economics and Finance*, 10(14), 227–236. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00297-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00297-4)
- Davidson, P. (2011). *Post Keynesian macroeconomic theory*. Edward Elgar Publishing.
- Di Domenico, S. I., & Fournier, M. A. (2014). Socioeconomic status, income inequality, and health complaints: A basic psychological needs perspective. *Social Indicators Research*, 119(3), 1679–1697.
- Gächter, S., Mengel, F., Tsakas, E., & Vostroknutov, A. (2017). Growth and inequality in public good

- provision. *Journal of Public Economics*, 150, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.03.002>
- Ghoshray, A., Ordóñez, J., & Sala, H. (2016). Euro, crisis and unemployment: Youth patterns, youth policies? *Economic Modelling*, 58, 442–453. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.017>
- Hidayat, M. (2014). Inequality across districts and cities in the Riau. *Economic Journal of Emerging Markets*, 6(1), 106–118.
- Khodeir, A. N. (2016). The Relationship between the Generation of Electricity from Renewable Resources and Unemployment: An Empirical Study on the Egyptian Economy. *Arab Economic and Business Journal*, 11(1), 16–30. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2015.10.003>
- Kim, D. (2016). The associations between US state and local social spending, income inequality, and individual all-cause and cause-specific mortality: The National Longitudinal Mortality Study. *Preventive Medicine*, 84, 62–68. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.11.013>
- Kudasheva, T., Kunitsa, S., & Mukhamediyev, B. (2015). Effects of Access to Education and Information-communication Technology on Income Inequality In Kazakhstan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 940–947. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.459>
- Kuncoro, A. (2006). Corruption and business uncertainty in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*, 11–30.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 1–28.
- Lavrínovicha, I., Lavrinenko, O., & Teivans-Treinovskis, J. (2015). Influence of Education on Unemployment Rate and Incomes of Residents. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, 3824–3831. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1120>
- Myrdal, G., & Sitohang, P. (1957). *Economic theory and under-developed regions*.
- Putra, A. H. P. K., Said, S., & Hasan, S. (2017). Implication Of External And Internal Factors Of Mall Consumers In Indonesia To Impulsive Buying Behavior. *International Journal of Business Accounting and Management ISSN*, 2(4), 1–10.
- Ram, R. (1982). International inequality in the basic needs indicators. *Journal of Development Economics*, 10(1), 113–117.
- Ram, R. (1992). Inter-country inequalities in income and basic-needs indicators: A recent perspective. *World Development*, 20(6), 899–905.
- Roşoiu, I. (2015). The Impact of the Government Revenues and Expenditures on the Economic Growth. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 526–533. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01428-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01428-8)
- Sadiku, M., Ibraimi, A., & Sadiku, L. (2015). Econometric Estimation of the Relationship between Unemployment Rate and Economic Growth of FYR of Macedonia. *Procedia Economics and Finance*, 19(15), 69–81. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00009-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00009-x)
- Sargent, T. J. (2009). *Dynamic macroeconomic theory*. Harvard University Press.
- Shao, C., Meng, X., Cui, S., Wang, J., & Li, C. (2016). Income-related health inequality of migrant workers in China and its decomposition: An analysis based on the 2012 China Labor-force Dynamics Survey data. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(10), 531–537. <https://doi.org/10.1016/j.jcma.2016.02.009>
- Strat, V. A., Davidescu(Alexandru), A., & Paul(Vass), A. M. (2015). FDI and The Unemployment - A Causality Analysis for the Latest EU Members. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), 635–643. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00448-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00448-7)
- Sukirno, S. (2004). Makroekonomi teori pengantar. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- www.bbc.com. (2014). *Ketimpangan pendapatan berdampak pada pertumbuhan ekonomi - BBC News Indonesia*. Online Webpage. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/12/141209_bisnis_ketimpangan_pendapatan
- www.kemenkeu.go.id. (2018). *Informasi APBN 2018*. Online Webpage. <https://www.kemenkeu.go.id/media/10409/apbn-kita-edisi-agustus-2018.pdf>
- www.worldbank.org. (2015). *Meluasnya Ketimpangan di Indonesia*. Online Webpage. <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>
- Yenny Tjoe. (2018). *Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?* Online Webpage. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/100200826/seberapa-parah-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia->